

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Gender adalah sebuah konsep dimana suatu sistem yang terdapat pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan oleh lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan politik. Kesetaraan gender atau *gender equality* yang berarti perempuan dan lelaki memiliki status hak yang sama serta mempunyai keadaan dan kesempatan yang sama untuk menyatakan hak-hak sebagai manusia dan mempunyai kontribusi pada pembangunan nasional suatu negara, perwujudan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terciptanya kesetaraan gender diwujudkan melalui tidak terdapatnya diskriminasi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam mencapai akses, kesempatan untuk berpartisipasi dan kontrol untuk memperoleh manfaat atas pembangunan (Hubeis, 2010).

Isu gender semakin banyak mendapatkan perhatian di beberapa dekade terakhir terutama di bidang ilmu pengetahuan sosial. Kaum feminis HI berfokus kepada ketidaksetaraan dasar antara perempuan dan laki-laki serta dampak dari ketidaksetaraan tersebut bagi partisipasi politik dunia. Gender mengarah kepada tingkah laku dan ekspektasi yang secara sosial dipelajari yang memisahkan antara maskulinitas dan feminitas (Runyan, V. Spike Peterson & Anne Sisson, 2011). Perubahan yang telah terjadi pada partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, perempuan diidentikan dengan kondisi dimana harus bertanggung jawab untuk rumah: merawat anak dan anggota keluarga lainnya, mempersiapkan makanan dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sebagian perempuan menghabiskan waktu hampir paling tidak dua kali lipat waktu kerja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki (United Nations, 2010).

Kesetaraan gender ditandai sebagai suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki mempunyai kondisi yang sama untuk dapat mewujudkan haknya secara penuh sebagai

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

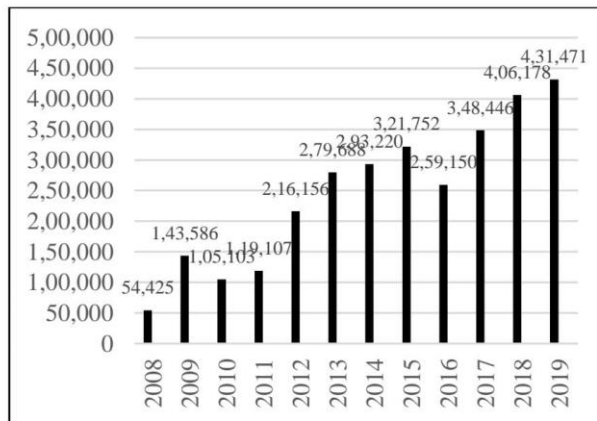
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

manusia. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi bagian dari capaian pembangunan bagi suatu negara di dunia yang mendapati disparitas pembangunan yang tinggi seperti di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, suatu kondisi yang dikenal sebagai ketidaksetaraan gender di dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender terjadi ketika pelaku menggunakan pengetahuan, sumber daya ekonomi, reputasi publik atau status sosialnya untuk menindas korban (Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi pada perempuan dapat dibagi melalui jenisnya yaitu :

1. Kekerasan verbal
2. Kekerasan fisik
3. Kekerasan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Grafik 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2008 - 2019



Sumber : Komnas Perempuan, 2019

Grafik 1 di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak delapan kali yang terjadi dalam kurun waktu 12 tahun. Kenaikan angka kekerasan yang cenderung terjadi mengidentifikasi kurangnya payung hukum yang menjaga keamanan dan menegakkan hak keadilan pada perempuan dari tindakan kekerasan dan kurangnya perhatian dari masyarakat terkait pelaporan

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tindakan kekerasan yang kerap terjadi di sekitar perempuan di Indonesia. Bahkan tak jarang tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, baik keluarga, tetangga dan teman yang semuanya dapat menjadi pelaku tindak kekerasan.

Selain itu, sebanyak 24.325 kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak Januari 2019 hingga September 2020. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terkait kejadian kekerasan terhadap perempuan dari September 2019 hingga September 2020, terdapat 24.584 orang yang menjadi korban kekerasan tersebut (Purnamasari, 2021). Dari data yang sama juga tercatat sebanyak 31.768 kasus kekerasan terjadi terhadap anak. Hal ini kemudian sesuai dengan tiga bentuk kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan sikap (merendahkan), kekerasan bahasa (mengumpat) dan yang terakhir adalah kekerasan fisik (memukul dan menendang).

Kekerasan seperti ini yang kemudian dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender merupakan sebuah kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dan dimana yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya dominasi peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, apa yang terjadi di Papua tentu menjadi fokus penelitian penulis dimana kekerasan yang kerap terjadi merupakan rentetan panjang yang terabaikan. Konflik yang menyangkut kesejahteraan hidup di Papua seperti diskriminasi, kurangnya edukasi terhadap perempuan, eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, ketidakadilan, kekerasan dan juga kejadian yang membuat trauma masyarakat Papua terjadi pada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan langsung di ranah privat mereka secara kultural (Neverokay, 2020).

Kekerasan berbasis gender diakibatkan dari adanya ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat dari adanya ketimpangan dominan dari konstruksi gender yang tidak setara. Hal ini dapat dibuktikan melalui sumber data statistik yang

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

diakses melalui Badan Pusat Statistik mengenai tingkat presentasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Papua. Indeks pemberdayaan gender digunakan sebagai data untuk menunjukkan partisipasi perempuan dalam memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan di Papua melalui bidang ekonomi dan sosial sangat menurun dan cenderung sedikit. Peranan perempuan dalam melakukan aktifitas di bidang ekonomi dan sosial sangat rendah. Kekerasan dan perempuan menjadi hal yang muncul secara bersamaan. Hal ini tentu menjadi permasalahan sebab tindakan seperti mengintimidasi, menampar, memperkosa dan membunuh dialami perempuan dan tidak terjangkau oleh aturan-aturan dan hukum akibat tidak adanya sensitifitas gender di dalamnya.

Konsep gender digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang melekat antara peran yang diciptakan Tuhan untuk laki-laki dan perempuan. Penetapan masyarakat tentang peran, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik perempuan dan laki-laki yang dianggap sesuai dengan norma, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah gender. Sehingga, menurut Badan Pusat Statistik, dikarenakan terdapat sistem dan struktur sosial yang menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai korban dari sistem tersebut, maka ketidakadilan gender dan kekerasan berbasis gender merupakan keadaan yang tidak adil. Hanya perbedaan sifat antara pria dan wanita yang dapat menjelaskan mengapa ada perbedaan antara jenis kelamin. Jika tercipta situasi dimana pembagian dan siklus sosial laki-laki dan perempuan adalah setara, serasi, seimbang, dan serasi, maka keadilan gender akan terjadi (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kasus kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia berada di wilayah Papua. Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap wanita di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia (Susanto, 2015). Menurut data Komnas Perempuan tahun 2013, rata-rata terjadi 1.360 kasus kekerasan terhadap perempuan untuk setiap 10.000 perempuan di Papua. Kasus kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan kasus lainnya.

Yona Melina, 2023

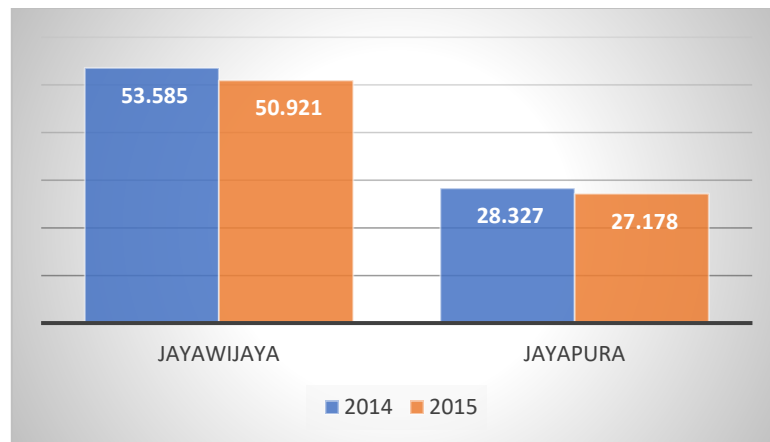
KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Antara dari tahun 2014 – 2015 memang belum ada peningkatan yang cukup signifikan di Papua terkait akses perempuan terhadap keadilan. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat dijamin secara hukum oleh konstitusi NKRI. Namun, kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan tersebut di Papua sangat berbeda dengan situasi di wilayah lain di Indonesia. Diskriminasi karena stigmatisasi politik adalah masalah umum dan meluas di Papua yang berdampak pada kehidupan perempuan Papua. Perempuan dicap sebagai separatis yang dimana lembaga pemerintah mati-matian memblokir akses mereka ke keadilan (CEDAW, 2016). Dua wilayah di Papua, yaitu Jayawijaya dan Jayapura termasuk wilayah yang masih tinggi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Di Jayapura, tingginya angka bunuh diri yang menimpa remaja putri akibat dari penyebab perdagangan manusia, KDRT serta kekerasan seksual.

Grafik 2 IDG di Papua, Jayawijaya dan Jayapura Tahun 2014 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari grafik 2 di atas, terdapat dua wilayah di Papua yaitu Jayawijaya dan Jayapura di tahun 2014 – 2015. Jumlah penduduk perempuan di Jayawijaya pada tahun 2014 sebanyak 100.630 namun hanya 53.585 jiwa yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam memainkan peranan perempuan dalam melakukan aktifitas di bidang ekonomi dan sosial sangat rendah atau jika dipersentasekan hanya sekitar 53.25% dari jumlah penduduk perempuan. Adapun di tahun 2015, jumlah penduduk wilayah Jayawija yaitu

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebanyak 100.694 jiwa dan hanya 50.921 jiwa yang memainkan peranan penting di beberapa bidang atau hanya sebesar 50.57% dari jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya ada pada wilayah Jayapura pada tahun 2014 sebanyak 56.587 penduduk perempuan hanya sekitar 50.06% yang berpartisipasi pada IDG atau jika dijumlahkan hanya sebanyak 28.327 dari jumlah penduduk perempuan. Di wilayah yang sama yaitu Jayapura pada tahun 2015, hanya sebanyak 27.178 penduduk perempuan yang berpartisipasi pada peranan perempuan dari total penduduk 50.921 jiwa. Di wilayah Jayapura banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun hanya 10% dari banyak kasus yang benar-benar sampai ke pengadilan. Sebagaimana diketahui, kasus pemerkosaan dan KDRT merupakan mayoritas kejahatan kekerasan yang ada di Papua. Menurut Anna Serpara, Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TPA) Provinsi Papua, diketahui banyak kejahatan kekerasan di Papua berdasarkan data dihimpun P2TPA ada 314 kasus pada tahun 2015 secara keseluruhan.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti adanya pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*), kemiskinan ekonomi pada perempuan, perlakuan memomorduakan perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Selain itu, permasalahan kasus kekerasan perempuan hanya 10% yang sampai pada tingkat pengadilan. Hal itu disebabkan ketika akan ditingkatkan proses hukumnya, pihak yang menjadi korban menarik pengaduannya dengan alasan kesepakatan keluarga. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan. Berdasarkan data yang tersedia di P2TPA menyatakan bahwa pada tahun 2015 ada sebanyak 314 kasus kekerasan yang terjadi di Papua (Wilpret Siagian, 2017). Sudah seharusnya perempuan dan anak turut berperan aktif dalam meningkatkan sektor pembangunan. Namun, pada kenyataannya kondisi maupun keadaan perempuan dan anak di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual menjadi penghambat peran mereka dalam mencapai kesejahteraan pembangunan. Adanya ketimpangan pembangunan antarkelompok jenis kelamin menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang belum optimal sehingga

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

diharapkan terdapat kondisi ideal di dalam pembangunan dimana penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama untuk bertindak dalam pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pejabat setempat di wilayah Jayawijaya dan Jayapura secara verbal melecehkan perempuan asli Papua dengan cara yang seksis dan rasis. Menurut informasi yang pada saat itu diambil yaitu pada Oktober 2013, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari perempuan asli Papua yang menjadi sasaran pelecehan verbal berupa ejekan dan menghilangkan identitas seksualnya sebagai perempuan dan identitas dasarnya sebagai wanita asli Papua.

Dengan adanya tuntutan dan kepentingan diatas, pemerintah Indonesia melakukan upaya kerja sama dengan *United States Agency for International Development* USAID atau Lembaga Pembangunan Internasional AS dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Papua. Melalui program USAID BERSAMA *Gender-Based Violence Prevention Program In Eastern Indonesia* dimana USAID merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak di isu kesetaraan gender ingin berupaya untuk melakukan pendampingan bersama dengan pemerintah di Papua. Hal yang melatar belakangi USAID membantu Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender adalah bahwa USAID percaya kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender merupakan hal mendasar untuk mewujudkan hak asasi manusia yang tidak dapat diambil dari manusia, yaitu hak yang melekat pada semua orang dan bersifat universal dan tidak dapat diganti. Selain itu, USAID menegaskan bahwa kunci untuk hasil pembangunan yang efektif dan berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan kesetaraan gender dan menghapuskan berbagai macam kekerasan berbasis gender. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat berkembang, perempuan dan anak perempuan harus memiliki akses yang setara dan aman ke sumber daya, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, modal, teknologi, layanan air dan sanitasi, tanah, pasar, dan keadilan yang harus mereka miliki (Yulianingsih, 2021).

Proyek ini dirancang dan dikelola oleh organisasi internasional disebut 'Winrock Internasional'. Organisasi ini merupakan organisasi non-profit di AS yang bekerja untuk internasional pembangunan di bidang sosial, pertanian, dan masalah

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lingkungan di lebih dari 40 negara. Selanjutnya, tim manajemen proyek USAID BERSAMA membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan departemen seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Kesehatan dan Pendidikan (Winrock International, 2017). Dalam melaksanakan program kepada masyarakat di wilayah sasaran, USAID-BERSAMA dan Winrock International bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil setempat. Ada empat Organisasi Masyarakat Sipil lokal di Jayapura yang mengelola proyek di desa-desa sasaran. Organisasi-organisasi tersebut adalah: 1) Yayasan Harapan Ibu (YHI), 2) Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas/ LEKAT Papua, 3) Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua/LP3AP), dan 4) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Papua (Persatuan Perempuan Indonesia untuk Hak Papua/LBH APIK) (Winrock International, 2017).

USAID dianggap mampu untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender dan kesetaraan gender di Papua. Hal ini dikarenakan tujuan dari program USAID BERSAMA adalah mengimplementasikan Program Pencegahan BERSAMA – Kekerasan Berbasis Gender selama lima tahun di Indonesia Timur salah satunya adalah Papua. Kemitraan ini ditunjukkan mengurangi kekerasan berbasis gender dengan mencapai tiga hasil antara yang saling terkait diantaranya : (1) Berkurangnya kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan gender (2) Penguatan kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan dasar terkait kekerasan berbasis gender dan (3) Peningkatan suara untuk organisasi masyarakat sipil dalam memerangi kekerasan berbasis gender (USAID, 2018).

Pemerintah AS berkomitmen pada tingkat tertinggi untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Mandat global USAID dalam pembangunan dan bantuan kemanusiaan menempatkan badan ini pada posisi yang kuat untuk secara efektif menangani masalah yang kompleks dan beragam ini. USAID bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender dengan: mengatasi akar penyebab kekerasan; meningkatkan

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelayanan pencegahan dan perlindungan; menanggapi kebutuhan kesehatan dan ekonomi mereka yang terkena dampak kekerasan berbasis gender; dan mendukung perundang-undangan dan penegakannya terhadap kekerasan berbasis gender.

Selain itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Baik perempuan maupun laki-laki mampu mencapai aspirasi sosial, ekonomi dan politik mereka, dan berkontribusi serta membentuk keputusan tentang masa depan, komunitas global tidak akan berhasil mempromosikan perdamaian dan kemakmuran. Mewujudkan kebijakan ini di semua negara akan memungkinkan USAID menjadi kekuatan katalis untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia dan mewujudkan visi dunia di mana semua orang sama-sama diberdayakan untuk mengamankan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka.

Alasan penulis mengambil periode waktu 2016-2020 karena terdapat data yang menunjukkan bahwa IDG di Papua dari dua tahun sebelumnya mengalami angka yang memperlihatkan angka turun. Selain itu, program USAID BERSAMA memang dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. USAID memiliki komitmen jangka panjang untuk mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender (GBV), mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, mempromosikan kesetaraan gender dalam mitigasi iklim, memberdayakan remaja perempuan, melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dan menangani norma-norma gender dan mendukung yang kurang terlayani dan populasi yang terpinggirkan.

Adapun yang melatar belakangi pengambilan penelitian ini di Papua, dikarenakan melibatkan inisiatif di bidang lingkungan hidup; ketangguhan demokrasi dan tata kelola pemerintahan; pengembangan SDM dan kemitraan; dan kesehatan, dimana posisi USAID di Indonesia sangat penting. Hal ini terkuak karena di satu sisi misi USAID untuk menggabungkan program dukungan untuk proses demokratisasi dan HAM dan di sisi lain program ini juga untuk menjaga kepentingan nasional AS. AS secara aktif mendukung pembangunan di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Papua, melalui USAID. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjelaskan upaya USAID untuk membantu Indonesia menangani kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini, penulis ingin melihat keefektifan program yang diberikan oleh USAID kepada masyarakat Papua terutama perempuan.

Dalam penulisan penelitian ini, tentu mengambil perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan terlihat sisi perbedaan yang akan diangkat dari penulisan ini. Melihat pada penelitian sebelumnya oleh Yaron (2021), menjelaskan bagaimana kekerasan berbasis gender (GBV) terjadi di Kabupaten Sentani – Provinsi Papua, Indonesia, dan Proyek kerja sama USAID BERSAMA dapat menciptakan kesadaran di daerah tersebut. Proyek yang dimulai pada akhir tahun 2016 ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan penting seperti pemerintah daerah, pemerintah adat, organisasi masyarakat sipil (OMS), gereja dan komunitas. Proyek ini mengadopsi pendekatan pemasaran norma sosial untuk mengubah cara masyarakat memandang GBV, serta menyangkut konteks lokal. Ini merupakan salah satu pendekatan terbaik dan efektif untuk menangani proyek perubahan perilaku.

Menurut penelitian Pirlott (2018), kekerasan berbasis gender adalah fenomena kompleks dan multifaset yang dialami secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki. Pada penelitian ini berfokus pada upaya pendekatan teori dan metode yang canggih untuk mengkonseptualisasikan dan mengkaji faktor-faktor yang memediasi dan memoderasi relasi gender terhadap pengalaman kekerasan intim. Kekerasan semacam itu mengambil banyak bentuk, berakar pada struktur sosial patriarki dan peran budaya perempuan dan laki-laki dimana hal ini diperkuat oleh citra media yang kemudian hal ini tentu akan berpengaruh pada efek psikologis, sosial serta perilaku dari kekerasan tersebut. Alderton (2020), menulis dalam penelitiannya bahwa kekerasan berbasis gender dalam kaitannya dengan sepuluh kelayakan hidup perkotaan dalam segi lingkungan : kecenderungan minuman alkohol, kejahatan dan kekacauan lingkungan, lingkungan perjudian, kualitas dan keterjangkauan perumahan, transportasi umum, akses ke layanan lokal, modal sosial lingkungan, pengangguran tingkat area, ruang hijau dan penerangan jalan.

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada penelitian terdahulu selanjutnya membahas tentang peran dan pesan di media sosial akan mendapatkan dukungan berupa gerakan kesetaraan gender. Hal ini disampaikan oleh penelitian yang ditulis oleh Saleem (2021). Pada penelitian ini memiliki fokus utama dalam menentukan aspek pesan media sosial yang dapat menghalangi atau mempromosikan keberhasilan gerakan. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pesan yang disampaikan oleh pria dapat mengumpulkan lebih luas dukungan dari laki-laki dan perempuan seputar isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, laki-laki cenderung menerima pesan yang menganjurkan kesetaraan gender lebih baik dari laki-laki lain. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks media sosial juga penting bahwa isyarat norma kelompok (dukungan sosial) juga menunjukkan dukungan laki-laki. Penelitian ini menghasilkan bahwa dukungan sosial dapat berpotensi sebagai indikator norma sosial, dan penelitian menunjukkan bahwa persepsi norma sosial, terutama norma kelompok referensi penting, dapat berdampak kuat pada perilaku untuk melakukan gerakan kesetaraan gender.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Chotim (2019), dalam penelitian ini mengambil studi kasus di suatu wilayah dengan subjek anggota keluarga, penelitian jurnal ini mengambil subjeknya adalah UKM atau Usaha Kecil Menengah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kesuksesan sebuah UKM didirikan di Cirebon dan dipimpin oleh seorang wanita. Namun, tidak terdapat dukungan dari pemerintah sekitar karena masih terhalangnya faktor terkait aktualisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di Indonesia. Masih di dalam tema yang sama pada penulisan yang ditulis oleh Nur (2019), mengatakan bahwa strategi pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pengarus utamaan perempuan yang utama. Sebab, pemberdayaan perempuan terkait dalam meningkatkan pengetahuan lingkungan dan pembangunan perlu mendapatkan perhatian langsung dari berbagai pihak. Hal ini bertujuan agar sumber daya manusia di Indonesia dapat berguna bagi pembangunan berkelanjutan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin membenahi kesetaraan gender yang di dukung oleh berbagai pihak terutama dari pemerintah. Penelitian ini juga memiliki kesamaan pada penelitian yang penulis angkat karena

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sama-sama ingin membahas keterkaitan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang mendukung.

Sehubung dengan adanya kompleksitas ekonomi antara ketidaksetaraan gender yang berhubungan dengan faktor di dalam dunia pendidikan pada penelitian yang ditulis oleh Ella (2019), penelitian ini menyatakan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah cenderung memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang lebih tinggi. Selain itu juga terdapat perbedaan bahwa perbedaan ini karena adanya kompleksitas ekonomi membutuhkan lebih banyak pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Selaras dengan Sitorus (2016), bahwa dampak ketimpangan gender di Indonesia tentu akan mempunyai efek penting dalam mengurangi kemiskinan selain itu pemerataan kesempatan di dalam sektor pendidikan dan juga pekerjaan akan menghasilkan dampak positif bagi suatu negara/wilayah untuk bersaing. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk menurunkan ketimpangan gender untuk membuat rencana kebijakan yang mementingkan peningkatan kesehatan dan juga pendidikan serta upaya partisipasi perempuan di dalam peran sosial maupun ekonomi. Penelitian ini membahas bahwa partisipasi pendidikan akan berpengaruh pada tingkat kesetaraan gender.

Selain itu, keterkaitan pembangunan tidak pernah lepas dibahas baik di negara berkembang, negara terbelakang dan juga negara maju. Dalam penelitiannya, Musyafak (2017) menyatakan bahwa persoalan ini lebih harus dibangun sebuah komunikasi dan partisipatif dari masyarakat. Selanjutnya, pada penelitian ini menjelaskan bahwa ada peran gender yang tidak harus disamakan antara laki-laki dan perempuan, ada kondisi dimana hanya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun sebaliknya. Perempuan berpartisipasi dalam proses dan badan pengambilan keputusan sehingga terdapat suatu keputusan bahwa keterwakilan dari perempuan sebagai delegasi partai dapat diikutsertakan. Office IUCN (2017), menyatakan di dalam penelitian ini bahwa keikutsertaan wanita di partai politik tentu akan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan pelatihan kegiatan dan mempromosikan kesetaraan gender partisipasi dalam pertemuan Konferensi Para Pihak

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan badan-badan pendukungnya jelas-jelas memiliki dampak. Persamaan dari penelitian ini adalah lebih menekankan bahwa gender sebagai sebuah ‘konstruksi sosial’ dan juga gender sebagai alat analisis yang baik untuk dipahami sebagai persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum.

Adapun yang membedakan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penelitian yang penulis angkat adalah penelitian sebelumnya hanya membahas pada satu desa saja di wilayah Papua yaitu di Desa Sentani. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat membahas secara keseluruhan dari adanya program USAID BERSAMA di dua Kabupaten di Papua yaitu Jayapura dan Jayawijaya. Selanjutnya ada pada penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa sektor pendidikan berpengaruh terhadap tingginya kekerasan berbasis gender di Papua namun pada penelitian ini juga akan menjelaskan bahwa faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh dan masih melekat erat pada masyarakat Papua sehingga tingkat kekerasan pada perempuan kerap terjadi. Pada penelitian sebelumnya tidak menjelaskan dampak dari adanya kekerasan berbasis gender dan pada penelitian yang penulis angkat tentu akan menjelaskan dampak yang terjadi dan dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya ada pada penelitian sebelumnya cenderung membahas dari segi teori dan dari segi lingkungan eksternal berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat akan lebih membahas keterkaitan atau faktor yang menjadi penyebab kekerasan berbasis gender terjadi. Penulis akan menjelaskan USAID BERSAMA sebagai program menangani kekerasan berbasis gender di Papua dan hasil yang diberikan USAID kepada masyarakat Papua khususnya perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan program USAID sebelumnya dengan negara Pakistan yang dilakukan pada tahun 2012 membawa dampak yang baik. Keberhasilan tersebut membawa hasil berupa pemberian layanan kesehatan, hukum, dan konseling kepada sekitar 61.000 perempuan penyintas Kekerasan Berbasis Gender (GBV), pemberian lebih dari 6.600 beasiswa pendidikan tinggi untuk wanita muda di Pakistan, mendukung Kementerian Federal HAM untuk melatih 196 jaksa penuntut umum tentang undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, masalah gender, dan perlindungan hukum bagi para penyintas GBV, memberikan pelatihan dan membiayai lebih dari 50.000 pengusaha wanita, memfasilitasi pendaftaran kartu identitas nasional untuk sekitar 1,5 juta perempuan untuk mempromosikan hak suara perempuan dan membantu melatih hampir 16.000 perempuan perwakilan partai politik (Gender Equality and Female Empowerment, 2020). Hal ini tentu menjadikan Indonesia perlu untuk melakukan kerja sama kepada USAID.

Program USAID BERSAMA yang mulai dilakukan sejak tahun 2016 memunculkan kerja sama antara lembaga independen dari AS yaitu USAID dengan Indonesia. USAID BERSAMA adalah program lima tahun yang didasarkan pada strategi yang didorong secara lokal untuk mengurangi penerimaan kekerasan berbasis gender di dalam keluarga dan masyarakat, tingkatkan pelayanan kepada para penyintas dan memperkuat organisasi lokal untuk meningkatkan suara mereka dalam memerangi kekerasan berbasis gender. Namun, dapat dilihat bahwa IDG di Papua yang belum stabil dan menunjukkan hasil yang turun. Selain itu, kekerasan berbasis gender di Papua yang masih tinggi serta kesetaraan gender yang belum optimal. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesenjangan yang kemudian memunculkan pertanyaan masalah: **“Bagaimana Peran Kerja Sama yang dilakukan USAID BERSAMA dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender dan Kesetaraan Gender di Papua Periode 2016 – 2020?”**

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk, pertama, mengetahui dinamika awal terbentuknya kerja sama Indonesia – USAID dalam sektor pembangunan dan sosial serta menambah ke dalam kerja sama menangani kekerasan berbasis gender di Indonesia kemudian dampak yang diakibatkan dari adanya kerja sama tersebut khususnya di Papua. Kedua, untuk mengetahui implementasi yang diberikan oleh program USAID BERSAMA dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender di Papua (2016-2020).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan mampu memberikan informasi terkait kerja sama Indonesia – USAID. Adapun manfaat atau relevansi yang dibagi menjadi dua dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi dampak positif berupa pengetahuan, sumber informasi maupun referensi bagi akademisi, peneliti, pemerintah, lembaga masyarakat, pengamat kerja sama antara Indonesia dan USAID dalam menangani kekerasan berbasis gender dan dapat membantu penulis untuk lebih memahami masalah di masyarakat khususnya mengenai kekerasan berbasis gender di Indonesia terutama di Papua. Selain itu, dapat memberikan manfaat informasi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat luas serta dapat memahami dinamika kerja sama hingga proses hubungan kerja sama dua negara yang dapat menumbuhkan pembangunan suatu negara.

1.4.2. Manfaat Akademis

Secara akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan akan membawa beberapa manfaat untuk masyarakat dalam melakukan kajian ilmiah dan juga

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memberikan informasi lebih jelas mengenai peran kerja sama Indonesia – USAID dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender di Papua serta menambah wawasan dari cabang ilmu sosial dan politik yaitu Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan hubungan kerja sama bilateral, pembangunan negara dan implementasi kerja sama tersebut terhadap pembangunan di suatu negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang berisi alasan pengambilan judul, latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan/sumber referensi tentang kekerasan berbasis gender di Indonesia dan kerja sama Indonesia – USAID. Kemudian membahas konsep dan teori penelitian yang dihubungkan secara umum pada kekerasan berbasis gender dan kerja sama Indonesia – USAID.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi terkait metodologi penelitian yang digunakan dan deskripsi profil yang terkait dengan penelitian yaitu mengatasi kekerasan berbasis gender di Papua yang dilakukan atas kerja sama Indonesia – USAID. Kemudian, pada bab ini juga akan menjelaskan terkait jenis penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk menjelaskan informasi yang didapatkan selama penelitian tentang kerja sama Indonesia – USAID.

Bab IV Kondisi Permasalahan Kekerasan Berbasis Gender Di Papua

Bab ini berisi tentang kondisi permasalahan kekerasan berbasis gender yang terjadi dimulai dengan hubungan gender dan relasi gender pada kekerasan perempuan

Yona Melina, 2023

KERJA SAMA INDONESIA – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENANGANI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAPUA, INDONESIA (2016 – 2020)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang terjadi di Indonesia. Kemudian fenomena kekerasan berbasis gender di Papua dihubungkan dengan faktor yang melatar belakangi kekerasan berbasis gender tersebut terjadi dan dampaknya terhadap perempuan yang menjadi korban.

Bab V Realisasi Kerja Sama dan Implementasi USAID dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender di Papua

Bab ini berisi tentang dinamika/sejarah awal kerja sama antara Indonesia – USAID lalu berikuit dengan USAID BERSAMA sebagai program menangani kekerasan berbasis gender di Papua. Pada bab ini juga akan menjelaskan upaya realisasi dan implementasi dari program yang diberikan oleh USAID BERSAMA kepada masyarakat Papua terutama perempuan serta tantangan dan hambatan dalam menangani kekerasan berbasis gender di Papua.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta saran penulis tentang topik yang telah di bahas. Selain itu, pada bab ini juga terdapat Lampiran dan Daftar Pustaka dengan berisikan berbagai jenis data yang digunakan mulai dari data buku, thesis, literatur dan jurnal yang digunakan selama proses penulisan yang dimasukkan dalam penulisan skripsi ini.